

**EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA KANTOR
CAMAT MORI UTARA**



Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi

Universitas Sintuwu Maroso

Oleh :

SIN ATRIA NINGSY PANDI

91911404122089

PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SINTUWU MAROSO

POSO

2023

Sin Atria Ningsy Pandi, nomor pokok mahasiswa **91911404122089** dengan judul **“Evaluasi Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pada Kantor Camat Mori Utara”**, dibawah bimbingan **Sudarto Usuli** sebagai pembimbing I dan **Ratno** sebagai pembimbing II.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Kantor Kecamatan Mori Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Mori Utara, dengan melakukan wawancara dan dokumentasi bersama pegawai/staf Operator SIMDA Keuangan sebagai Informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SIMDA Keuangan dalam penyusunan laporan keuangan di Kecamatan Mori Utara telah berjalan cukup efektif. Hal tersebut dapat dilihat dari para pegawai/staf yang telah memahami makna SIMDA keuangan, keberhasilan sasaran (ketepatan waktu), dan kepuasan penggunaan SIMDA secara umum. SIMDA keuangan memudahkan proses penyusunan laporan keuangan. Meskipun terdapat kendala seperti eror jaringan, dan salah server namun dapat diatasi dengan menyediakan pengadaan server cadangan, adapun faktor lain yang dimiliki untuk mendukung pelaksanaan penerapan SIMDA keuangan yaitu komunikasi, sumber daya manusia, sikap/disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : SIMDA Keuangan, Penerapan.



Sin Atria Ningsy Pandi, NIM: 91911404122089, "Evaluation of the Implementation of the Regional Management Information System Application (SIMDA) at the Mori Utara Subdistrict Office", supervised by Sudarto Usuli and Ratno.

ABSTRACT

The aim of this research is to find out the implementation of the Regional Management Information System (SIMDA) Finance at the Mori Utara Sub-District Office. The research method used is descriptive qualitative. This research was conducted in North Mori District, by conducting interviews and documentation with SIMDA Financial Operator employees/staff as informants.

The results of this research show that the application of Finance of SIMDA in preparing financial reports in Mori Utara Sub-District has been quite effective. Employees/staff understand the meaning of Finance of SIMDA, target success (timeliness), and satisfaction with using SIMDA in general. SIMDA finance makes the process of preparing financial reports easier. Even though there are obstacles such as network errors and server errors, they can be overcome by providing a backup server. Other factors that are needed to support the implementation of financial SIMDA are communication, human resources, attitude/disposition and bureaucratic structure.

Keywords: *SIMDA Finance, Implementation.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II.....	6
TINJAUAN PUSTAKAN DAN KERANGKA PIKIR.....	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.1.1 Akuntansi Pemerintahan	6
2.1.2 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	7
2.1.3 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	9
2.1.4 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)	10
2.1.5 Tujuan dan Manfaat SIMDA	12
2.1.6 Keunggulan SIMDA	13
2.1.7 SIMDA Keuangan.....	13
2.1.8 Pengertian Efisiensi dan Efektivitas.....	14
2.2 Penelitian Terdahulu.....	15
2.3 Kerangka pikir	17

BAB III	18
METEDOLOGI PENELITIAN	18
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	18
3.2 Metode Penelitian.....	18
3.3 Jenis dan Sumber Data	19
3.4 Teknik Pengumpulan Data	19
3.5 Populasi dan Sampel	20
3.6 Teknik Analisis Data	20
3.7 Definisi Operasional.....	21
BAB IV	23
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	23
4.1. Hasil Penelitian.....	23
4.1.1. Gambaran Umum Kecamatan Mori Utara	23
4.1.2. Visi Dan Misi Kecamatan Mori Utara	24
4.1.3. Tugas Pemerintah Kecamatan Mori Utara.....	25
4.1.4. Implementasi SIMDA Keuangan Pada Kantor Camat Mori Utara. 38	
4.1.5. Pemahaman SIMDA Keuangan	39
4.1.6. Faktor Pendukung Penerapan SIMDA Keuangan.....	41
4.1.7. Kualitas informasi yang dihasilkan SIMDA keuangan.....	44
4.1.8. Efektivitas penerapan SIMDA keuangan.....	45
4.2. Pembahasan	46
4.2.1. Pemahaman SIMDA Keuangan	46
4.2.2. Faktor Pendukung Penerapan SIMDA Keuangan.....	47
4.2.3. Kualitas Informasi yang dihasilkan SIMDA Keuangan.....	49
BAB V	51
KESIMPULAN DAN SARAN.....	51
5.1 Kesimpulan.....	51
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan adalah subbidang akuntansi yang berfokus pada instansi pemerintah. Akuntansi pemerintahan memiliki karakteristik yang unik, seperti peningkatan pencatatan pelaksanaan APBN dan pelaporan pencapaiannya. Tujuan data akuntansi yang digunakan dalam akuntansi pemerintahan adalah untuk menginformasikan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan publik tentang transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah. Untuk memfasilitasi manajemen keuangan atau aset yang lebih transparan dan akuntabel, dan untuk meningkatkan integritas informasi pelaporan keuangan pemerintah dan pengukuran kinerja.

Pemerintah adalah entitas publik yang menawarkan layanan komunal dan berfungsi sebagai katalisator dan fasilitator untuk kemajuan kesejahteraan suatu daerah. Entitas sektor publik, khususnya lembaga pemerintah, diberi mandat untuk menyediakan laporan keuangan kepada masyarakat umum. Entitas publik dengan tujuan memberikan layanan kepada masyarakat harus memiliki kapasitas untuk menyediakan sistem informasi interaktif yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Negara telah melimpahkan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengawasi dan mengurus pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah wajib menjaga transparansi dan akuntabilitas

kepada publik dengan menyajikan laporan keuangan secara berkala. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, pemerintah daerah diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah melalui adopsi dan pemanfaatan kemajuan teknologi di bidang teknologi informasi. Selain itu, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk membuat laporan keuangan ini dapat diakses oleh masyarakat umum. Salah satu pendekatan untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang efisien adalah melalui pemanfaatan teknologi berupa sistem informasi yang disebut Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yaitu sistem informasi yang dirancang khusus untuk memudahkan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertindak sebagai auditor internal dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) telah mengembangkan Sistem Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (SIMDA) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Perkembangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang relevan, ketentuan, dan praktik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah. Peraturan ini mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terlibat aktif dalam pengembangan dan implementasi kemajuan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah secara efektif dan memfasilitasi penyebaran informasi keuangan daerah ke layanan publik. Berdasarkan pemikiran tersebut, program Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dikembangkan oleh BPKB. Salah satu komponen SIMDA adalah SIMDA Keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah.

Agar permohonan SIMDA Keuangan dianggap efektif, maka harus memenuhi beberapa syarat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ayu et al. (2021), efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan perusahaan bersama, di mana tujuan tersebut berfungsi sebagai indikator tingkat efektivitas. Keberhasilan penerapan sistem informasi dapat disimpulkan dari kemampuan lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan yang tepat waktu, komprehensif, tepat, dan dapat diandalkan.

SIMDA Keuangan adalah sistem komprehensif yang secara efektif menangkap, mengelola, dan menganalisis data keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan informasi terkait lainnya. Sistem mengubah data ini menjadi informasi berharga yang dapat diakses oleh publik dan berfungsi sebagai sumber daya penting bagi para pengambil keputusan yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan akuntabilitas pemerintah daerah.

Kabupaten Mori Utara telah melaksanakan Program Aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Morowali Utara. Sejak tahun 2015, SIMDA Finance telah diimplementasikan sebagai salah satunya. Kecamatan Mori Utara merupakan organisasi pemerintahan yang terdiri dari delapan desa yang bertujuan untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian dari otonomi daerah, melaksanakan tugas pemerintahan umum, mengkoordinasikan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat, melaksanakan komunikasi dan pengelolaan informatika di tingkat kecamatan, dan menyelenggarakan urusan kesekretariatan atau tata usaha di tingkat kecamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu operator pemegang SIMDA di Kecamatan Mori Utara, peneliti menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah belum efektif dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 karena masih menggunakan SIMDA yang tidak aktif. Sejak tahun 2021 hingga saat ini, SIMDA telah dilaksanakan secara online dan telah memenuhi seluruh persyaratan regulasi. Selain itu, jaringan menjadi salah satu kendala di Kantor Kecamatan Mori Utara yang menghambat efisiensi proses entry data.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“EVALUASI PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH (SIMDA) PADA KANTOR CAMAT MORI UTARA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, masalah dapat dirumuskan: Bagaimana Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Pada Kantor Camat Mori Utara ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan : Untuk mengetahui apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen (SIMDA) di Kantor Camat Mori Utara telah dijalankan secara efektif.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka yang menjadi manfaat penelitian sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman, sumber informasi, dan masukan bagi implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) Kantor Kecamatan Mori Utara.
2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil peneliti ini diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dalam penyusunan peneliti selanjutnya atau peneliti-penelitian sejenis.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sintuwu Maroso.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, P., Laksmi, P., & Mariadi, Y. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) untuk Pengelolaan Keuangan*. 19(1), 72–86.
- Abdul, HT 2009, *Akuntansi Pemerintah Daerah: Konsep dan Aplikasi Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan*, Alfabeta, Bandung.
- Anwar, M. Khoirul, dan Oetojo S, Asianti. (2004). *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah SIMDA*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- BPKP.(2010). *Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)*.(On_line). <http://www.bpp.go.id/sakd/333/Versi2.1.bpk>. Diakses pada 10 April 2021
- Camat, K., Rantau, P., & Kuantan, K. A. B. (2020). *Analisis Penerapan Akuntansi Pemerintahan Pada Kantor Camat Pucuk Rantau Kab. Kuantan Singingi*.
- Fahriyanti, A. (2021). *Analisis Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Kantor Kecamatan Kramat*. 1–8.<http://eprints.poltektegal.ac.id/946/%0Ahttp://eprints.poltektegal.ac.id/946/1/>
- Lantang, K. (2020). Analisis Efisiensi Pendapatan Supir Angkot Sesusdah Pasar Sentral Poso. *Jurnal EKOMEN*, 20(1), 1–9.
- Laporan, K. (2012). *Penerapan sistem informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pada kantor camat seberang ulu ii palembang*. x, 1–20.
- Machmud, Rizan. (2013) "*Peranan Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap Efektivitas Kerja Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Narkotika (LAPASTIKA) Bollangi Kabupaten Gowa*". dikutip 13 Juni 2019 Diakses dari:repository.ung.ac.id/melalui.
<http://repository.ung.ac.id/get/karyailmiah>.
- PP Nomor 56 Tahun 2005
- Yanto, E. (2019). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda Keuangan)*. 3(1).